



RENCANA STRATEGIS BISNIS BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA 2025 - 2029

Jl. Percetakan Negara No.23A
Jakarta Pusat- Indonesia
email: kontak@bpfkjakarta.or.id

LEMBAR PENGESAHAN 1

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

TAHUN ANGGARAN 2025 - 2029

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Subadri', is positioned above the printed name and NIP.

Subadri, ST.M.Si.
NIP. 197611122005011003

LEMBAR PENGESAHAN 2

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

TAHUN ANGGARAN 2025 - 2029

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

PEJABAT PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dita Novianti', with a stylized flourish at the end.

Dita Novianti S.A, S.Si, Apt.MM
NIP. 197311231998032002

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Resume Renstra Kementerian Kesehatan	2
B. Visi, Misi,Tugas Pokok, dan Fungsi BPAFK Jakarta.....	3
C. Target Rencana Strategis Bisnis.....	4
BAB II	6
ANALISIS DAN STRATEGI.....	6
A. Evaluasi Kinerja BLU	6
1. Aspek Layanan	6
2. Aspek Keuangan.	8
3. Aspek Sumber Daya Manusia	12
4. Aspek Sarana dan Prasarana	12
B. Analisis SWOT	13
C. Analisis TOWS	14
D. Inisiatif Strategis	15
BAB III RSB BPAFK JAKARTA.....	16
BAB IV PENUTUP.....	26
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Resume Renstra Kementerian Kesehatan

Visi nasional jangka panjang pemerintah saat ini adalah transformasi fundamental tahap pertama dari RPJPN 2025–2045, meliputi aspek: sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, budaya-ekologi, pembangunan wilayah & prasarana, dan keberlanjutan. Visi Presiden tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Guna mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan, Kemenkes menetapkan 5 (lima) tujuan strategis yakni :

1. Layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
2. Deteksi dini dan pencegahan penyakit.
3. Penurunan angka kematian ibu, bayi, dan stunting.
4. Perluasan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
5. Penguatan sistem kesehatan nasional termasuk tenaga, fasilitas, teknologi, dan pembiayaan.

Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif dan mencapai target RPJMN bidang kesehatan. Transformasi sistem kesehatan diterjemahkan ke dalam 6 pilar transformasi kesehatan. BPAFK Jakarta yang menjadi unit pelayanan teknis Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan turut mendukung salah satu transformasi Kesehatan yaitu: Transformasi sistem ketahanan kesehatan, dalam rangka menuju sistem ketahanan kesehatan yang tangguh Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan melakukan strategi dan arah kebijakan antara lain:

1. Masyarakat sehat dan berbudaya hidup sehat
2. Pelayanan kesehatan inklusif
3. Sistem ketahanan kesehatan
4. Tata kelola dan pembiayaan kesehatan efektif
5. Teknologi kesehatan maju
6. Kapabilitas sistem kesehatan nasional

Ditjen Farmalkes fokus pada penguatan produksi dalam negeri. BPAFK Jakarta dalam mendukung program Direktorat Jenderal Farmasi dan alat kesehatan (Ditjen Farmalkes) melalui indikator program antara lain:

1. Persentase produk alat kesehatan/PKRT yang memenuhi standar berdasarkan pengawasan pre-market.
2. Persentase jenis alkes yang diproduksi dalam negeri dari total alkes populer (19 jenis)

Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) sebagai salah satu UPT di Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta, sehingga peralatan dan sarana prasarana fasilitas kesehatan memenuhi kualitas dan standar keselamatan dan keamanan kepada tenaga kesehatan maupun kepada pasien. Untuk menjaga kesinambungan mutu alat kesehatan yang sesuai dengan standar.

Dalam memberikan layanan pengujian kalibrasi di Indonesia, Kementerian Kesehatan saat ini telah menetapkan 5 Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) yang berlokasi di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Surakarta dan 1 Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) yang berlokasi di Banjarbaru, Institusi pengujian milik Pemda Provinsi/Kabupaten (Prov. NTB, Prov. DIY, Prov. Jateng, Prov. Lampung, Prov. Banten, Kabupaten Malang dan lainnya) serta sekitar 120 Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan (IPFK) milik swasta. Sebagian besar IPFK swasta berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

B. Visi, Misi, Tugas Pokok, dan Fungsi BPAFK Jakarta

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPAFK Jakarta telah menetapkan visi sebagai petunjuk arah dalam kegiatan rutinnya. Adapun visi BPAFK Jakarta adalah “Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”. Rencana jangka Panjang BPAFK Jakarta yang dituangkan dalam visi ini ditetapkan dengan melihat situasi dan kondisi pelayanan kalibrasi di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut di atas, BPAFK Jakarta mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini;
2. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan;

3. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel.

Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta saat ini telah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2023, dalam melaksanakan kegiatannya Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan mengemban Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan menjalankan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- d. Kalibrasi alat ukur standar;
- e. Pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;
- f. Pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
- g. Inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pengujian alat kesehatan;
- h. Inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
- i. Inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
- j. Pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- l. Pelaksanaan kerja sama;
- m. Pengelolaan data dan informasi;
- n. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang PAFK.

C. Target Rencana Strategis Bisnis

Target Rencana Strategis Bisnis tertuang dalam dokumen renstra yang disajikan dibawah ini dengan tujuan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pengembangan BPAFK Jakarta dalam

membuat perencanaan secara terpadu dan harmonis serta cara pengendaliannya untuk jangka waktu 5 tahun (2025- 2029). Diharapkan renstra tersebut mampu mendukung program Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan menuju sistem ketahanan kesehatan yang tangguh.

Tujuan dari Rencana Strategi Bisnis Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah :

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana strategis Kementerian Kesehatan
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan BPAFK Jakarta
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi BPAFK Jakarta dan dalam pencapaian visi yang telah ditetapkan
4. Rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para *stakeholders* inti UPT vertikal.

BAB II

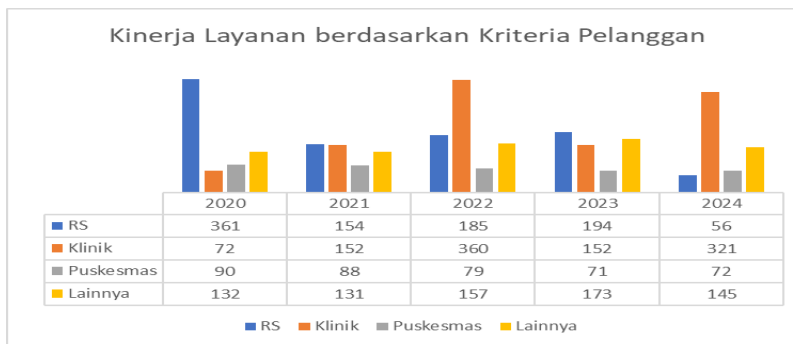
ANALISIS DAN STRATEGI

A. Evaluasi Kinerja BLU

BPAFK Jakarta berdiri tanggal 9 April 1992, yang memiliki kemampuan pelayanan pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi serta inspeksi sarana, prasarana dan alat kesehatan. Untuk menilai kinerja BPAFK Jakarta dalam mewujudkan visi dan misinya, perlu dianalisa perkembangan/keberhasilan yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir. Adapun aspek yang termasuk dalam penilaian meliputi:

1. Aspek Layanan

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 BPAFK Jakarta telah melakukan pelayanan kepada pelanggan dengan data seperti gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Kinerja Layanan Berdasarkan Kriteria Pelanggan

Tabel di bawah ini menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan jumlah faskes setiap tahunnya. Tren positif dikarenakan peningkatan kesadaran faskes terhadap kebutuhan jaminan mutu melalui pengamanan fasilitas kesehatan dan memiliki ruang lingkup akreditasi terbanyak dibandingkan IPFK lainnya, sedangkan tren negatif disebabkan bertumbuhnya IPFK lainnya di daerah. Penurunan jumlah rumah sakit pada pada Gambar 1 dikarenakan fokus layanan BPAFK Jakarta pada rumah sakit tipe A dan B, yang memiliki jumlah populasi alkes lebih banyak, seperti RSCM, RSPJN Harapan Kita, RSUP Hasan Sadikin dll. Rumah sakit tersebut telah diikat dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS), strategi ini berhasil meningkatkan produksi layanan yang tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Kinerja Layanan BPAFK Jakarta tahun 2020-2024

No	Jenis Layanan Jasa	Satuan	Produksi Layanan Jasa				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengujian/Kalibrasi Alkes	Alat Kesehatan	22642	27571	32295	45544	42000

2	Kalibrasi alat ukur standar & radiasi	Alat Ukur	598	512	1344	1552	864
3	Inspeksi Sarana Prasarana	Instalasi	413	68	214	724	95
4	Uji kesesuaian pesawat X-Ray	Alat Kesehatan	590	727	750	960	580
	Pemantauan Dosis perseorangan	Unit	17,591	18393	19373	24349	27660
5	Uji Produk	Alat Kesehatan	46	60	110	414	144
6	Bimbingan Teknis	Orang	74	49			35
7	Uji Profisiensi	Alat Kesehatan dan Alat Ukur	25	41	136	348	160
Total			24.406	47.421	54.222	73.891	73.562

Tabel di atas juga menunjukkan 3 jenis layanan terbesar yaitu Pengujian kalibrasi alkes, Uji kesesuaian x-ray dan pemantuan dosis perorangan. Tingginya peminat layanan ini dikarenakan BPAFK Jakarta memiliki jumlah layanan yang mendapatkan pengakuan akreditasi dari KAN untuk jenis layanan pengujian, kalibrasi dan inspeksi sarana prasarana alat Kesehatan sebanyak 128 jenis layanan. Selain itu regulasi akreditasi untuk rumah sakit yang mewajibkan kalibrasi alat kesehatan, dan masuk dalam penilaian, dan persyaratan utama bagi rumah sakit yang akan bekerjasama dengan BPJS, sesuai Permenkes No. 71 tahun 2013 pasal 6 menyatakan bahwa “syarat bekerjasama dengan BPJS haruslah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi”.

2. Aspek Keuangan.

a. Realisasi Anggaran Belanja BPAFK Jakarta

BPAFK Jakarta mendapatkan alokasi anggaran bersumber dari rupiah murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada gambar 2 kami sajikan perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran BPAFK tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2. Persentase Realisasi Anggaran BPAFK Jakarta Tahun Anggaran 2020-2024

Tabel 2. Pendapatan BPAFK Jakarta 2020-2024

Pendapatan Negara Bukan Pajak	2020	8.000.000.000	9.261.467.625	114%
	2021	8.500.000.000	10.153.764.120	116%
	2022	9.000.000.000	15.108.359.000	140%
	2023	19.126.205.000	25.594.826.148	125%
	2024	29300000000	32.138.299.747	109%

Tabel 3. Belanja BPAFK Jakarta 2020-2024

Belanja	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Rupiah Murni & PNBP	2020	36.977.450.000	29.359.896.039	79,40%
	2021	38.204.327.000	35.526.091.678	92,99%
	2022	32.357.091.742	29.464.367.740	91,06%
	2023	75.238.715.000	73.916.245.890	98,24%
	2024	52.130.975.000	50.889.106.390	97,62%

Berdasarkan gambar 2 terlihat realisasi anggaran tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2021

Realisasi anggaran tahun 2021 mencapai 92,99% dari total anggaran Rp38.204.327.000. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar $\pm 21\%$ dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp29.359.896.039.

Peningkatan tersebut disebabkan antara lain:

- Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog yang mempercepat pelaksa-

naan kegiatan.

b. Meningkatnya kepatuhan Koordinator Substansi dalam melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat waktu.

2) Tahun Anggaran 2022

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 91,06% dari anggaran Rp32.357.091.742, mengalami penurunan sekitar 17% dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini disebabkan antara lain:

- Adanya peningkatan signifikan pada belanja pegawai karena pembayaran kekurangan tunjangan kinerja selama 12 bulan, yang menyebabkan pergeseran alokasi belanja nonpegawai.
- Pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD), namun sebagian kegiatan mengalami efisiensi anggaran.

3) Tahun Anggaran 2023

Realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 98,24% dari total anggaran Rp75.238.715.000, mengalami kenaikan signifikan sekitar 151% dibandingkan realisasi tahun 2022.

Kenaikan ini disebabkan antara lain:

- Optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog serta percepatan proses administrasi keuangan.
- Koordinasi yang baik antara unit perencanaan anggaran, pelaksana kegiatan, dan pihak terkait lainnya dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan.

4) Tahun Anggaran 2024

Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai Rp50.889.106.390 atau 97,62% dari total anggaran Rp52.130.975.000. Meskipun secara nominal menurun dibandingkan tahun 2023, tingkat efektivitas penyerapan tetap tinggi, menunjukkan perencanaan yang lebih efisien dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

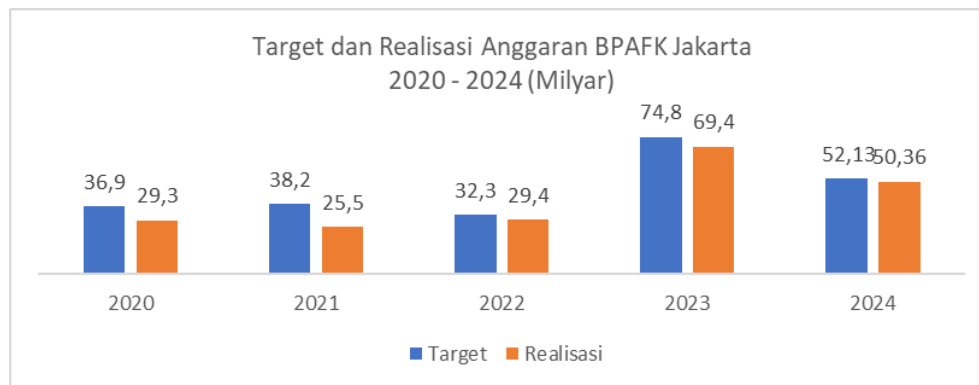
Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja BPAFK Jakarta Tahun Anggaran 2019 s.d 2024

No.	SUMBER DANA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi APBN (Rupiah Murni)	24.208.049.477	29.441.443.255	23.479.844.349	71.269.007.520	19.233.606.047
	Belanja Pegawai	10.588.898.740	10.594.415.600	11.193.309.939	11.847.843.491	13.334.160.336
	Belanja Barang (Operasional + Non Operasional)	7.577.517.594	8.905.742.209	7.910.366.294	5.065.543.249	5.899.445.711
	Belanja Modal	6.041.633.143	9.941.285.446	4.376.168.116	54.355.620.780	
2	Realisasi PNPB	5.151.936.562	6.084.648.423	7.120.654.336	10.538.222.578	31.125.811.954
	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
	Belanja Barang	5.147.333.135	6.084.648.423	6.016.736.991	10.538.222.578	13.441.274.505
	Belanja Modal	4.603.427		1.103.917.345	-	17.684.537.449
3	Jumlah Realisasi (APBN+PNPB)	29.359.986.039	35.526.091.678	30.600.498.685	81.807.230.098	50.359.418.001

b. Target dan Pendapatan PNBP

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPAFK Jakarta selama kurun waktu 2020 – 2024` selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Faktor keberhasilan tersebut diantaranya meliputi :

- 1) Meningkatnya kepercayaan dari rumah sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya terhadap layanan BPAFK Jakarta. Jumlah layanan yang mendapatkan pengakuan akreditasi dari KAN untuk pengujian, kalibrasi dan inspeksi sarana prasarana alat Kesehatan sebanyak 63 jenis layanan.
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelayanan rumah sakit yang bermutu dan aman bagi pasien.
- 3) Meningkatnya jumlah cakupan jenis layanan dan cakupan wilayah setiap tahunnya.
- 4) Penambahan sumber daya meliputi penambahan peralatan dan peningkatan kompetensi petugas. Serta manajemen yang efektif dalam melayani pelanggan.



Gambar 3. Target dan Realisasi PNBP BPAFK Jakarta Tahun Anggaran 2020 – 2024

Pendapatan PNBP BPAFK Jakarta didapat dari penerimaan beberapa jenis layanan yang telah dilakukan, seperti tertuang dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 5. Pendapatan BPAFK Jakarta Berdasarkan Jenis layanan

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	Rp5.376.361.420	Rp5.509.471.300	Rp8.383.150.000	Rp10.394.367.200	Rp14.461.433.857
Jasa Uji Kesesuaian X-Ray	Rp621.367.000	Rp792.014.000	Rp5.058.759.000	Rp2.641.355.200	Rp2.723.307.595
Jasa Pemantauan dosis perorangan	Rp2.557.300.000	Rp2.642.150.000	Rp2.642.150.000	Rp3.529.676.200	Rp3.017.586.999
Jasa Inspeksi Sarana dan Prasarana	Rp144.026.000	Rp614.446.000	Rp434.476.000	Rp1.000.480.400	Rp1.626.948.350
Jasa kalibrasi alat ukur standar	Rp200.672.000	Rp405.132.000	Rp691.113.000	Rp1.794.900.600	Rp2.582.258.200
Jasa Uji Profisiensi	Rp69.792.000		Rp193.248.000	Rp803.760.300	Rp766.733.000
Jasa Bimbingan Teknis/magang	Rp20.550.000	Rp45.800.000	Rp47.725.000	Rp1.375.436.700	Rp1.174.649.000

Jasa Uji Produk	Rp38.640.000	Rp133.570.000	Rp300.888.000	Rp3.718.178.811	Rp3.861.158.800
Pendapatan Belanja diluar Tupoksi	Rp232.759.205	-	-	-	-
Lembaga Sertifikasi Produk	-	-	-	Rp294.364.200	Rp181.074.000
Jasa Perbankan	-	-	-	Rp41.784.236	Rp286.717.986
Pengembalian belanja pegawai tahun 2021		Rp11.180.820	-		
Penjualan Alkes (TLD Badge)					
Jumlah Pendapatan	Rp9.261.467.625	Rp10.153.764.120	Rp17.751.509.000	Rp25.594.303.847	Rp30.681.867.787

c. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Efisiensi kinerja keuangan diukur menggunakan rasio perbandingan pendapatan operasional dibagi beban operasional dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan BPAFK Jakarta dalam mengelola biaya operasional. Hasil perhitungan POBO dari tahun 2020 – 2024 mengalami penurunan, di tahun 2020 terjadi kenaikan POBO karena adanya peningkatan pendapatan layanan sesuai tugas dan fungsi. POBO tahun 2021 mengalami penurunan karena pembelanjaan untuk operasional keperluan pandemi Covid-19. POBO tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya karena adanya penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2022 terjadi kenaikan POBO yang signifikan karena naiknya pendapatan sebesar 65% dari tahun 2021 ke 2022.

Tabel 6. Rasio POBO BPAFK Jakarta Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan Operasional	Total Belanja Operasional	POBO
2020	Rp10.351.475.858	Rp23.091.451.923	45%
2021	Rp9.592.188.100	Rp34.530.027.543	28%
2022	Rp15.132.320.300	Rp33.109.969.757	46%
2023	Rp25.803.012.028	Rp38.909.050.355	66%
2024	Rp3.217.300.170	Rp44.465.469.515	72%

Pendapatan pada perhitungan POBO tabel diatas hanya memasukan pendapatan dari jasa layanan



Gambar 4 Rasio POBO BPAFK Jakarta tahun 2020-2024

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan pelayanan BPAFK Jakarta tahun 2021

berjumlah 134 orang, terdiri dari 55 orang teknis PNS, 24 orang teknis non PNS, 32 orang tenaga teknis non PNS, dan 23 orang tenaga non teknis non PNS. Peningkatan SDM BPAFK Jakarta dilakukan melalui jalur pendidikan formal melalui tugas belajar dan ijin belajar. Selain itu, peningkatan SDM BPAFK Jakarta juga dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPAFK Jakarta. Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan pelayanan BPAFK Jakarta terdiri dari tenaga teknis dan non teknis dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi. Data SDM BPAFK Jakarta dari tahun 2017 s.d 2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Data SDM BPAFK Jakarta tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Kepegawaian		Pendidikan								Golongan												Jabatan				Usia			
	PNS/P3K	PPNPN	SD	SMP	SMA	DIII	DIV	S1	S2	Ic	Id	Iia	Iib	Iic	Iid	IIa	IIb	IIc	IIId	IVa	Ivb	Struktural	JFT	JFU	Lainnya	21-30	31-40	41-50	51-50	
2020	88	33	0	2	24	33	4	53	5	0	2	1	1	6	9	14	16	14	19	5	1	5	51	32	33	27	30	39	16	
2021	87	47	0	1	22	38	7	59	7	0	1	1	1	6	8	16	12	17	17	7	1	5	46	39	47	39	39	40	16	
2022	91	44	0	1	7	21	4	49	9	0	1	1	1	11	5	14	14	16	15	13	0	2	62	27	44	13	30	36	12	
2023	92	37	0	1	6	22	4	50	9	0	0	2	0	9	8	14	15	15	16	11	2	2	62	27	37	12	34	29	17	
2024	94	39	0	1	10	40	17	54	11	0	0	2	0	8	10	10	21	8	21	11	3	2	67	25	39	41	40	28	24	

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Tabel 8. Tabel Aspek Sarana dan Prasarana

No.	Instalasi	Alat Ukur	Kemampuan Jenis Layanan	Layanan Terakreditasi
1	Laboratorium Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	350	101	27
2	Laboratorium Uji Kesesuaian X-Ray dan PDP	99	27	15
3	Lembaga Inspeksi Sarana dan Prasarana	89	17	3
4	Laboratorium kalibrasi alat ukur standar dan alat ukur radiasi	47	16	8
5	Penyelenggara Uji Profisiensi	9	17	7
6	Laboratorium Uji Produk	27	34	1
7	Bimbingan Teknis	-	6	2

BPAFK Jakarta memiliki laboratorium Pengujian dan atau Kalibrasi, Lembaga Inspeksi, Penyelenggara Uji Profisiensi sebagai ujung tombak dalam melakukan layanan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi sarana prasarana alat kesehatan. Ketersediaan alat ukur mempengaruhi kemampuan jenis layanan dan layanan yang terakreditasi. Satu layanan pengujian, kalibrasi, atau inspeksi memerlukan lebih dari 1 (satu) alat ukur. Untuk meningkatkan mutu layanan, BPAFK Jakarta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan PPSDM Kesehatan.

Indikator kegiatan BPAFK Jakarta sebelum menjadi BLU juga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 9. Indikator dan Kegiatan BPAFK Jakarta tahun 2020 – 2024

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Terwujudnya kepuasan pelanggan	1. Indeks kepuasan pelanggan	%	74	76	78	80	81
2. Peningkatan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	2. Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Jumlah	54	79	81	81	92
	3. Jumlah ruang lingkup pelayanan	Jumlah	126	200	225	235	243
3. Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	4. ketepatan waktu penerbitan sertifikat/laporan sesuai SPM	%	40	50	60	70	80
4. Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta	5. Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	%	91	92	93	94	94
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta	6. Penambahan kompetensi pada tenaga SDM Fungsional	Jumlah	25	30	35	40	80
6. Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	7. Pendapatan PNBP	Jumlah	9,02 M	10,1 M	15,1 M	25,59 M	29,9 M
	8. Jumlah sertifikat /Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Jumlah	43.238	47.700	49.300	51.200	52.000
7. Terwujudnya tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LAKIP	AA	AA	A	A	AA

Mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 indikator kegiatan BPAFK Jakarta mengalami peningkatan.

Capaian – capaian tersebut didukung dengan adanya beberapa aspek yang telah dijelaskan sebelumnya.

B. Analisis SWOT

Menentukan langkah strategis yang tepat dalam mencapai sasaran / tujuan Visi dan Misi, BPAFK Jakarta melakukan Analisis SWOT dan TOWS dengan menginventarisasi semua elemen faktor Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman) meliputi sektor kelembagaan, sistem prosedur, sarana dan prasarana, SDM (faktor internal) maupun faktor teknologi, peralatan kesehatan, regulasi, lingkungan di Kementerian Kesehatan, pasar dan persaingan (faktor eksternal) dan diberi bobot berdasarkan nilai strategisnya. Faktor Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman) BPAFK Jakarta kami sajikan pada lampiran.

Berdasarkan Nilai bobot analisa SWOT, BPAFK Jakarta memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahannya ($243 - 126 = 117$), dan peluang yang lebih besar dibanding ancamannya dan ($164 - 57 = 107$). Berdasarkan uraian diatas peta posisi organisasi BPAFK Jakarta tampak pada gambar 6. Posisi organisasi berada pada kwadran I yang artinya organisasi harus menjalankan strategi ekspansif

C. Analisis TOWS

Analisis TOWS adalah analisa matriks dari komponen-komponen SWOT untuk menentukan beberapa alternatif strategi. Beberapa faktor penting dari komponen-komponen SWOT dipilih masing-masing berdasarkan nilai tertinggi dan kemudian dimatrik sedemikian rupa sehingga muncul beberapa alternatif strategi dari komponen S-O (Strengths - Opportunities), S - T (Strengths - Threats), W-O (Weaknesses - Opportunities) dan W - T(Weaknesses-Threats) sebagaimana terlihat pada tabel matriks analisis TOWS berikut:

Tabel10. Matriks TOWS BPAFK Jakarta

Matriks TOWS Strategi Program			
PROGRAM			
	NO	FAKTOR KEKUATAN (S)	FAKTOR KELEMAHAN (W)
	1	Kedudukan sebagai Instansi milik pemerintah memposisikan BPFK sebagai rujukan nasional	Belum terinternalisasi nilai nilai visi bersama sebagai acuan kerja
	2	BPFK Jakarta telah memperoleh akreditasi ISO 17025 dan 17020 dari KAN	Belum optimalnya sistem informasi manajemen dalam menunjang fungsi pelayanan
	3	SDM yang kompeten dan tersertifikasi	Terbatasnya jumlah SDM
	4	Memiliki program peningkatan mutu SDM	Sistem insentif belum berbasis kinerja
	5	Memiliki tarif yang kompetitif	Tata kelola keuangan belum fleksibel dan mandiri
	6	Memiliki peralatan yang memadai dalam segi jumlah jenis dan teknologi	Sarana dan prasarana belum memadai
	7	Memiliki ruang lingkup akreditasi terbanyak dibanding institusi sejenis	Belum optimal mekanisme penjadwalan dan respon time pelayanan

NO	FAKTOR PELUANG (O)	STRATEGI KEKUATAN + PELUANG	STRATEGI KELEMAHAN + PELUANG
1	Besarnya kebutuhan pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA di seluruh wilayah Indonesia	(S1234567 : O1234) Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	(W13 : O12345) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta
2	Meningkatnya kebutuhan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman	S1234367 : O12345) Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan)	(W2456:O1234)Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel
3	Bertambahnya jumlah Fasyankes yang mengajukan akreditasi	(S123467 : O12345) Terwujudnya kepuasan pelanggan)	(W6: O1234) tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas
4	Adanya kewajiban pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA		
5	Luasnya jejaring kerja dengan stakeholder dalam bidang pengujian/kalibrasi alkes		
NO	FAKTOR ANCAMAN/TANTANGAN (T)	STRATEGI KEKUATAN + ANCAMAN	STRATEGI KELEMAHAN + ANCAMAN
1	Menurunnya tingkat kepuasan pelanggan terkait penerbitan sertifikat/laporan hasil SPA	(S1234567 : T17) Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	(W127 : T17) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta
2	Terbatasnya formasi SDM/PNS untuk penempatan di BPFK Jakarta		

D. Inisiatif Strategis

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi BPAFK secara kualitatif dan kuantitatif dapat ditunjukkan dengan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan target indikator kinerja utama yang berimplikasi pada capaian sasaran strategis dan diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung usaha tersebut.

Tabel 11. Sasaran Strategis dan Kegiatan BPAFK Jakarta

Sasaran Strategis	Kegiatan
1. Peningkatan kepuasan pelanggan	1. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Temu Pelanggan 3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan 4. Survey Kepuasan Pelanggan (indeks)
2. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	1. Penambahan ruang lingkup akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017, 17020:2012, 17043:2010, 17065:2012 2. Audit eksternal dari Lembaga Akreditasi Nasional
3. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA	1. Pengadaan buku standar, 2. Pelatihan Teknis 3. Uji coba metode 4. Uji banding antar lab, 5. Pengembangan teknologi.
4. Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	1. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi 2. Peningkatan Kompetensi SDM 3. Kaji ulang dokumen manajemen 4. Kaji ulang Manajemen/Evalasi Tahunan
5. Pengembangan sarana dan prasarana BPAFK Jakarta	1. Pengadaan alat pengolah data 2. Renovasi gedung 3. Pengadaan alat ukur standar & alkes 4. Pemeliharaan alat pengujian kalibrasi 5. Pengadaan jasa kebersihan 6. Pengadaan sarana & prasarana
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta	1. Pelatihan teknis & manajemen, uji kompetensi, diklat sertifikasi 2. Pemeriksaan kesehatan secara berkala 3. Pengadaan penambah daya tahan tubuh
7. Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	1. Pengujian dan Kalibrasi alkes 2. Uji Kesesuaian X-ray dan Dosimetri 4. Kalibrasi alat ukur standar/radiasi 5. Inspeksi Sarana Prasarana Faskes 6. Uji Produk 7. Penyelenggara Uji profisiensi 8. Bimbingan teknis
8. Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	Evaluasi kinerja secara berkala

BAB III
RENCANA STRATEGIS BISNIS
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

A. Program Kementerian Kesehatan

Sesuai dengan tujuan, arah kebijakan, strategi dan sasaran strategis RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menyusun target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan untuk tahun 2025-2029 yang tetap mengacu pada enam pilar transformasi kesehatan, yaitu :

1. Transformasi layanan primer
2. Transformasi layanan rujukan
3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan
4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
5. Transformasi SDM Kesehatan
6. Transformasi teknologi kesehatan

Untuk melaksanakan enam pilar transformasi tersebut, Kementerian Kesehatan memiliki dua kategori program, yaitu program generik dan program teknis dengan uraian sebagai berikut :

1. Program generik, meliputi program dukungan manajemen, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Program teknis, meliputi program pencegahan dan pengendalian penyakit, program kesehatan masyarakat, dan program pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program-program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Ditjen Farmalkes memiliki Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program di beberapa Direktorat dibawah Dirjen Farmalkes yang dapat didukung oleh BPAFK Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu alat kesehatan di peredaran;
2. Meningkatnya alat kesehatan dan alat diagnostik hasil inovasi atau joint venture produksi dalam negeri;

3. Meningkatnya alat kesehatan dalam negeri di peredaran dan penggunaannya di pelayanan kesehatan;
4. Meningkatnya pengawasan pre market alat kesehatan dan PKRT sesuai Good Review Practice;
5. Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT;
6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

BPAFK Jakarta sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mendukung pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Adapun Indikator – indikator yang dapat didukung oleh BPAFK Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat;
2. Jumlah 10 terbesar alat kesehatan dan alat diagnostik yang diproduksi di dalam negeri;
3. Persentase jumlah produk alkes pada e-katalog yang telah memiliki sertifikat TKDN di atas 50%;
4. Persentase penilaian izin edar Alat Kesehatan (Alkes), diagnostik invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai janji layanan;
5. Persentase kesesuaian permohonan perizinan pre market Alat Kesehatan (Alkes), diagnostik invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) terhadap persyaratan yang ditetapkan;
6. Persentase alat kesehatan kelas C dan D yang diawasi;
7. Persentase sarana produksi Alkes yang tersertifikasi CPAKB;
8. Persentase sarana distribusi Alkes yang tersertifikasi CDAKB;
9. Persentase sarana distribusi alat kesehatan Non-PIE (Pemilik Izin Edar) yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik);
10. Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Perubahan kedudukan BPAFK Jakarta dari UPT dibawah Direktorat Pelayanan Kesehatan menjadi UPT dibawah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel. Matriks Keterkaitan antara sasaran dan indikator kinerja

No.	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		PIC	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN									
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholder	KPI. 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tata Operasioanl	83	83	84	84	85
		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel	KPI. 2	Perolehan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	Administrasi Umum	35,9 M	41,4 M	54,15 M	66,59 M	67,23 M
		Peningkatan cakupan jenis pelayanan sarana, prasarana, dan alat SPA	KPI. 3	Penambahan ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Tata Operasioanl	10 ruang lingkup	10 ruang lingkup	10 ruang lingkup	10 ruang lingkup	10 ruang lingkup
			KPI. 4	Penambahan ruang lingkup pelayanan	Tata Operasioanl	15 ruang lingkup	20 ruang lingkup	25 ruang lingkup	30 ruang lingkup	35 ruang lingkup
		Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI. 5	Persentase ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	Pelayanan Teknis	77%	80%	82%	85%	86%
		Meningkatnya kualitas sarana, prasarana, dan alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	KPI. 6	Persentase peralatan yang telah dikalibrasi	Tata Operasioanl	67%	70%	73%	76%	78%
		Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten	KPI. 7	Persentase SDM ASN yang telah mengikuti pelatihan	Bimbingan Teknis	96%	97%	98%	99%	99%
		Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di BPFK secara optimal	KPI. 8	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	Bimbingan Teknis	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
			KPI. 9	Persentase ketepatan waktu pelayanan	Pelayanan Teknis	82%	84%	86%	88%	90%

			KPI.10	Terselenggaranya integrasi sistem informasi layanan berbasis digital	Administrasi Umum	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem
		Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	KPI.11	Kenaikan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Administrasi Umum	5 poin	5 poin	5 poin	5 poin	5 poin
		Meningkatnya pengawasan sarana dan produk alat kesehatan dan PKRT	KPI.12	Jumlah prototipe produk alkes yang diuji BPAFK	Pelayanan Teknis	580	600	630	650	700
			KPI.13	Jumlah alat kesehatan yang diuji produk post market	Pelayanan Teknis	50 Alat	55 Alat	60 Alat	65 Alat	70 Alat
			KPI.14	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	Pelayanan Teknis	47000 Alat	49000 Alat	50000 Alat	51000 Alat	52000 Alat
			KPI.15	Persentase sarana distribusi alat kesehatan non-PIE yang diinspeksi paska sertifikasi CDAKB	Pelayanan Teknis	32%	34%	36%	38%	40%
			KPI.16	Jumlah metode pengujian jenis produk alkes yang dikembangkan BPAFK	Tata Operasioanl	72 metode	74 metode	76 metode	78 metode	80 Metode
2	Program Dukungan Manajemen									
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	KPI.17	Nilai kinerja penganggaran BPAFK Jakarta	Administrasi Umum	95 Nilai	95 Nilai	95 Nilai	95 Nilai	95 Nilai
			KPI.18	Persentase realisasi target pendapatan BLU	Administrasi Umum	95%	95%	96%	96%	97%
			KPI.19	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Umum	95%	96%	96%	97%	98%
			KPI.20	Persentase rekomendasi hasil audit yang telah tuntas ditindaklanjuti	Administrasi Umum	96%	97%	98%	99%	99%

B. Strategi Bisnis BLU

Sasaran strategis BPAFK Jakarta sebagai Badan Layanan Umum dapat dicapai dengan membuat Strategis Bisnis sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi layanan BPAFK Jakarta
2. Menerapkan pola tarif baru yang kompetitif berdasarkan zonasi dibanding IPFK Sejenis
3. Efisiensi dan efektifitas kegiatan layanan
4. Melakukan Inovasi terhadap layanan BPAFK Jakarta
5. Optimalisasi pengelolaan piutang
6. Menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17020, SNI ISO/IEC 17043, 17065 dan Standar Sertifikasi lainnya yang mendukung Visi dan Misi BPAFK Jakarta;
7. Meningkatkan jenis dan volume layanan dengan menambah ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi Sarana Prasarana;
8. Menjadi Pusat Pelatihan dan Sertifikasi SDM di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
9. Menjadi Penyelenggara Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium untuk lingkup kalibrasi, pengujian, dan inspeksi;
10. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (SimPEL BPAFKJ) untuk percepatan pelayanan;
11. Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
12. Inovasi percepatan pelayanan seperti one day service;
13. Perluasan layanan kalibrasi alat ukur standar pada lingkup industri alat kesehatan dan non alat kesehatan;
14. Pelayanan uji prototipe alat kesehatan dari industri, lembaga riset, dan universitas;
15. Tata kelola bidang keuangan yang sistematis dan akuntabel.

C. Kegiatan dan indikator

Penerimaan/pendapatan yang dikelola oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan sebagai Badan Layanan Umum akan meningkat. Kenaikan pendapatan ini bersumber dari peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu pendapatan dari jasa layanan pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan, pelatihan teknis, penyelenggara uji profisiensi antar laboratorium dan pendapatan dari usaha lainnya, meliputi jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Uji Kesesuaian X-Ray, Inspeksi Sarana Prasarana, Kalibrasi Alat Ukur Standar, Pelatihan Teknis , Uji Profisiensi, Uji Produk Alat Kesehatan, dan Pemantauan Dosis Perseorangan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Cakupan pangsa pasar pelayanan BPAFK Jakarta sebelum BLU terdiri dari 256 jenis layanan, proyeksi setelah menjadi BLU

mengalami peningkatan 10-15 Jenis lingkup layanan pertahunnya, terlampir pada tabel 32 pada dokumen lampiran. Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan pengadaan alat ukur, renovasi dan pengadaan gedung laboratorium, kerjasama operasional (KSO), dan pola tarif. Hal tersebut hanya dapat dimungkinkan dengan penerapan PPK-BLU.

Tabel 23. Kegiatan dan Indikator PK BLU BPAFK Jakarta

No	Sasaran Strategi Bisnis	Indikator	Kegiatan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	125 Pelanggan	150 Pelanggan	175 Pelanggan	200 Pelanggan	230 Pelanggan
			Temu Pelanggan					
			Monitoring dan					
			Evaluasi Pelayanan					
			Survey Kepuasan Pelanggan (indeks)	83	83	84	84	85
2	a. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	Jumlah ruang lingkup pelayanan yang terakreditasi	Penambahan ruang lingkup akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017, 17020:2012, 17043:2010.	92 ruang lingkup	96 ruang lingkup	104 ruang lingkup	110 ruang lingkup	150 ruang lingkup
			Audit eksternal dari Lembaga Akreditasi Nasional	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	4 lembaga
	b. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA	jumlah ruang lingkup pelayanan	Pengadaan buku standar	232 layanan	243 layanan	254 layanan	260 layanan	280 layanan
			Pelatihan Teknis					
			Uji coba metode					
			Uji banding antar lab					
			Pengembangan teknologi					
	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	ketepatan waktu penerbitan sertifikat/LHU sesuai SPM	Pengembangan Sistem Informasi Teknologi	70%	80%	90%	95%	97%
			Peningkatan Kompetensi SDM					
			Kaji ulang dokumen manajemen					
			Pengadaan alat					
			pengolah data					
			Renovasi gedung					
			Pengadaan alat ukur standar & alkes					
			Pemeliharaan alat					
4	Pengembangan sarana dan prasarana BPAFK Jakarta	Peningkatan keandalan alat ukur & kalibrator	pengujian kalibrasi	92%	94%	96%	98%	99%
			Pengadaan jasa kebersihan					
			Pengadaan sarana & prasarana					
5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta	Peningkatan kompetensi pada SDM	Pelatihan teknis & manajemen, uji kompetensi, diklat dan sertifikasi	85%	90%	95%	100%	100%
			Pemeriksaan kesehatan secara berkala					
			Pengadaan penambah daya tahan tubuh					
6	Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	Pengujian dan Kalibrasi alkes	13,9 M	13,93 M	19,94 M	21,33 M	22,4 M
			Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-ray	3,04 M	3,68 M	4,65 M	4,98 M	5,23 M
			Dosimetri	3,93 M	5,12 M	5,95 M	6,37 M	6,7 M
			Inspeksi Sarana Prasarana Faskes	1,54 M	1,69 M	1,96 M	2,1 M	2,2 M
			Kalibrasi alat ukur standar	3,03 M	4 M	5,15 M	5,51 M	5,78 M
			Penyelenggara Uji profisiensi	1,5 M	1,57 M	2,47 M	2,64 M	2,77 M

			Uji Produk	2,47 M	2,48 M	3,86 M	4,13 M	4,34 M
			LS Pro	4,26 M	6,89 M	7,23 M	7,74 M	8,12 M
			Bimbingan teknis dan Pelatihan	1,15 M	0,87 M	1,04 M	1,11 M	1,17 M
7	Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum	laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Evaluasi kinerja secara berkala	AA	AA	AA	AA	AA

D. Proyeksi Pendapatan BLU BPAFK Jakarta

Peningkatan PNBP tersebut bersumber dari penerimaan jasa dari penjualan Uji Produk alkes, layanan TLD, pelatihan teknis, uji profisiensi dan Uji kompetensi personil dan layanan inovasi yang sebenarnya memiliki potensi yang besar, mengingat pangsa pasar, kemampuan SDM yang dimiliki BPAFK Jakarta dan didukung sarana peralatan yang memadai. Rencana kegiatan BPAFK Jakarta jangka panjang 2025 – 2029 didapatkan dari kegiatan sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan layanan untuk meningkatkan pendapatan BPAFK Jakarta dari Analisa SWOT, antara lain adanya isu eksternal. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik, mulai diwajibkan tahun 2024. Kebijakan ini berdampak pada dua layanan unggulan BPAFK Jakarta yaitu Sertifikasi Sarana Produksi dan Uji produk Alat Kesehatan. Surat Edaran Dirjen Farmalkes Tentang Daftar Jejaring Laboratorium Pengujian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 yang mencantumkan BPAFK Jakarta sebagai salah satu Lab Uji yang ditunjuk untuk melakukan pengujian kalibrasi alat Kesehatan.
2. Sertifikasi Sarana Produksi yang disasar selanjutnya adalah Distributor Alat Kesehatan. Kewajiban setiap Distributor Alat Kesehatan untuk memiliki ijin operasional berupa Sertifikat CDAKB, merupakan peluang meningkatkan pendapatan BPAFK Jakarta. Data dari Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), jumlah distributor alkes yang mencapai 4.265 perusahaan. Distributor yang memiliki ijin operasional sertifikasi CDAKB, tercatat dalam data Kemenkes belum mencapai 50%.
3. Akreditasi layanan sertifikasi produk yang sudah dilayani pada tahun 2024, dan BPAFK Jakarta tahun 2024 telah diberikan Akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Produk oleh Komite Akreditasi Nasional, sehingga layanan ini bisa dilaksanakan sebagai sumber pendapatan baru untuk BPAFK Jakarta. Layanan ini akan memberikan daya tambah nilai jual alat Kesehatan produksi dalam negeri.
4. Tahun 2023, BPAFK Jakarta juga sudah menambah alat uji baru yang diperuntukan layanan pengujian alat Kesehatan non elektronik. Layanan baru di pengujian dan kalibrasi memperluas

pengguna layanan BPAFK Jakarta yang sebelumnya didominasi oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas. Pelanggan baru seperti produsen alat Kesehatan elktromedik dan non elektromedik merupakan pengguna baru layanan BPAFK Jakarta.

5. Layanan optimalisasi aset BPAFK Jakarta mulai dipersiapkan ditahun 2024 dimulai dengan jasa konsultasi dan sewa alat ukur di Rumah Sakit. Aset Sumber Daya Manusia BPAFK Jakarta yang kompeten dibidang pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan mulai diminati oleh Institusi Penguji Alat Kesehatan Swasta, Universitas dalam pengembangan riset alat Kesehatan dan institusi lainnya yang sedang mengembangkan alat Kesehatan dalam negeri. Sewa alat ukur yang akan dimulai layanannya adalah Alat Ukur untuk kalibrasi Thermohyrometer. Hasil kajian, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mempunyai $\pm$ 350 Thermohyrometer untuk seluruh ruangnya, hal ini merupakan peluang untuk mendapatkan pendapatan.
6. Tahun 2024, BPAFK Jakarta membuka kantor cabang di Bandung, Jawa Barat. Strategi ini untuk mengambil pasar permintaan layanan pengujian kalibrasi di daerah Bandung dan sekitarnya. Dengan membuka cabang di Bandung maka memberikan keuntungan untuk pengguna jasa pengujian kalibrasi di daerah tersebut karena biaya operasional yang dikenakan menjadi lebih murah dibandingkan pembiayaan dari Jakarta. Uji coba kantor Cabang di Bandung ini tidak menutup kemungkinan untuk dibukanya cabang di daerah lainnya yang memiliki potensi besar.

Proyeksi pendapatan BPAFK Jakarta dengan menerapkan PK BLU dituangkan dalam laporan aktifitas keuangan sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan aktifitas keuangan dengan menerapkan BLU

Uraian	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
SALDO AWAL	8.747.916.637	21.982.520.055	1.982.520.055	2.937.145.175	2.800.720.575
PENDAPATAN RM	36.328.704.656	22.638.302.000	20.980.609.000	19.931.578.500	23.917.894.211
PENDAPATAN PNBPN	35.906.909.000	41.856.009.000	54.155.701.000	57.946.600.000	60.843.929.500
Jasa pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	13.927.088.298	13.927.087.798	19.939.980.100	21.335.778.700	22.402.567.600
Jasa Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray	3.040.000.000	3.675.020.800	4.656.950.100	4.982.936.600	5.232.083.400
Jasa Dosimetri	3.930.000.000	5.178.080.600	5.954.792.600	6.371.628.000	6.690.209.400
Jasa Inspeksi Sarana dan Prasarana	1.537.670.702	1.691.033.484	1.961.598.800	2.098.910.700	2.203.856.200
Jasa kalibrasi alat ukur standar	3.030.500.000	4.002.812.000	5.145.801.600	5.506.007.700	5.781.308.000
Jasa Uji Profisiensi	1.500.000.000	1.572.933.340	2.469.317.600	2.642.169.800	2.774.278.200

Jasa Bimbingan Teknis dan Pelatihan	2.476.100.000	2.476.100.000	3.859.350.900	4.129.505.900	4.335.981.100
Jasa Uji Produk	4.261.950.000	6.885.707.301	7.229.992.600	7.736.092.000	8.122.896.600
LS PRO	1.153.600.000	865.291.438	1.038.349.700	1.111.034.100	1.166.585.800
Pengampunan/Kemitraan	500.000.000	628.586.320	695.230.600	743.896.700	781.091.500
Penjualan Alkes/TLD	50.000.000	104.764.387	109.485.100	117.149.000	123.006.400
Jasa Giro	500.000.000	848.591.532	1.094.851.300	1.171.490.800	1.230.065.300
PENDAPATAN RM & PNP	59.001.010.238	84.494.311.000	74.306.199.500	78.014.603.100	84.788.221.192
BELANJA RM	36.328.704.656	22.638.302.000	20.317.498.300	19.318.894.000	23.917.894.212
Belanja Pegawai	15.133.994.856	19.388.850.000	10.119.311.900	10.625.277.500	13.154.700.411
Belanja Barang	8.133.116.250	3.249.452.000	4.847.512.700	3.878.010.200	4.801.198.120
Belanja Modal	13.061.593.550	0	5.350.673.700	4.815.606.300	5.961.995.681
BELANJA PNP/BLU	22.672.305.582	61.856.009.000	53.988.701.200	58.695.709.100	60.870.326.980
Belanja Barang	11.443.094.162	19.272.283.000	40.164.458.600	45.624.193.700	47.700.750.039
Belanja Modal	11.229.211.420	42.583.726.000	13.824.242.600	13.071.515.400	13.169.576.941
BELANJA APBN & PNP	59.001.010.238	84.494.311.000	74.306.199.500	78.014.603.100	84.788.221.192
Saldo	21.982.520.055	1.982.520.055	2.812.630.555	2.800.720.575	2.774.323.094

Proyeksi BPAFK Jakarta 5 tahun kedepan dengan melakukan menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) diharapkan pendapatan dan kemandirian BPAFK Jakarta akan meningkat seperti tergambar pada grafik dibawah ini:



Gambar 5. Proyeksi Pendapatan BPAFK Jakarta menerapkan BLU 2025 – 2029



Gambar 6. Tingkat Kemandirian terhadap rupiah murni

Merujuk pada grafik di atas, menggambarkan kondisi BPAFK Jakarta dalam belanja menggunakan anggaran APN dan Pendapatan BLU. Kondisi kemandirian BPAFK Jakarta semakin baik, ditandai dengan pendapatan PNBPN yang meningkat tajam. Alokasi APBN cenderung akan menurun seiring dengan kemandirian BPAFK Jakarta yang berkisar di angka 25% s.d 50%. Dengan menjadi PK BLU, BPAFK Jakarta dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PNBPN yang potensial, antara lain adanya pelayanan baru, melakukan inovasi dari pelayanan yang telah ada, dan melakukan kerjasama dengan mitra BPAFK Jakarta.

BAB IV

PENUTUP

BPAFK Jakarta bertujuan meningkatkan pelayanan dari aspek kuantitas dan kualitas dengan menerapkan PK-BLU, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2025-2029. Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan basebagai berikut:

1. BPAFK Jakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan Inspeksi sarana prasarana alat kesehatan, dengan meningkatkan kualitas, produktivitas dan efektivitas.
2. Mendorong Inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengamanan fasilitas Kesehatan.
3. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan optimalisasi aset dan sumber daya
4. Meningkatkan pendapatan untuk mendorong kemandirian keuangan dan kualitas layanan

Jakarta, 10 Desember 2025

Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas
Kesehatan Jakarta,



Subadri, ST.M.Si.

NIP.197611122005011003